



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : RSUD PANGLIMA SEBAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KAMAL ANSHARI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 859105

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **10.535.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m2/300 m2 di KAB / KOTA PASER, WARISAN Rp. 975.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 496 m2/250 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280.5 m2/170 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000
7. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.110.000.000
9. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA PASER, WARISAN Rp. 165.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 503.44 m2/255 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 998.67 m2/190 m2 di KAB / KOTA



PASER, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 387.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV TURBO PRESTIGE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

2. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 FI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000

3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 652.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.551.150.574

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 14.125.150.574

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 14.125.150.574

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.